

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Al Rasyid, H. I., & Rodiyah, I. (2023). Penerapan Program Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan: Analisis Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24, 1–13.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- Amelia, Y. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020. *KABA Journal of Management & Entrepreneurship*, 19(2), 18–36.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa)*, 2020-2022.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)*.
- BPPKAD Kabupaten Grobogan. (2014). *Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah*.
- BPS Kabupaten Sleman. (2022). *Keadaan Ketenagakerjaan Sleman Agustus 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.
- BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. (2023). *Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2023*.
- Creswell, J. W. (2008). *Research Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Daparhita, I. B. A., & Gorda, A. A. A. Ngr. T. R. (2018). Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 92–113.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Jenis Pajak Pusat*. Retrieved February 28, 2024, from <https://pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>
- Dunn, W. N. (1993). *Public Policy Analysis* (2nd ed.). Taylor & Francis.
- Dye, T. R. (2012). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Erin, Balliyand, A. F. Z., Murtanto, & Faisal, A. R. (2022). The Effect of Motor Vehicle Tax Bleaching Program on Taxpayer's Behavior through the Mediation of Tax Paying Intention in Lampung Province. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 172–179.
- Fachrunissa, H., & Fajriana, I. (2022). Analisis Pelaksanaan Dan Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Palembang (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 12(1), 121–129.

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. CRC Press.
- Hamidi, R., & Rivandi, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 297–309.
- Handayani, R. (2023). *Sri Mulyani: Pajak Daerah Penyumbang Terbesar PAD*. HarianJogja.com. (2023). *Sampai Awal Oktober, Capaian Pajak Kendaraan Bermotor di DIY 78 Persen dari Target Rp961 Miliar*.
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 93–99.
- Irhami, E. A., & Farizal, F. (2021). Forecasting the Number of Vehicles in Indonesia Using Auto Regressive Integrative Moving Average (ARIMA) Method. *Journal of Physics: Conference Series*, 1–7.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Kalalo, M. M. K., Kimbal, M., & Kimbal, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EKSEKUTIF*, 1(1), 1–11.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- KPPD DIY Kabupaten Sleman. (n.d.). *Profil KPPD Sleman - Yogyakarta*.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Lamia, A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 788–799.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. ANDI Yogyakarta.
- Meiryani, Abiyyah, M. E. A., Lindawati, A. S. L., Wahyuningtias, D., & Andrian, T. (2022). Determinants Of Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax In An Emerging Country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(2). <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2p3>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Mutiarin, D., Suranto, Darumurti, A., & Tamronglak, A. (2017). *Public Policy in Theory and Practice* (H. D. Jovita, Ed.). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurani, D. (2009). *Analisis implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan* [Tesis]. Universitas Indonesia.

- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 tahun 2007). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 6 tahun 1983). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 tahun 2014). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Perpres No. 5 tahun 2015). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (Pergub No. 100 Tahun 2018). Yogyakarta
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor an Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Pergub No. 26 Tahun 2020). Yogyakarta
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Pergub No. 42 Tahun 2020). Yogyakarta
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub No.26 Tahun 2020 ttg Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Pergub No. 101 Tahun 2020). Yogyakarta
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Pergub No. 62 Tahun 2021). Yogyakarta
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15(1), 236–242.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo.
- Rattu, D. C. F., Wokas, H. R. N., & Suwetja, I. G. (2022). Analysis Of the Implementation Of Motor Vehicle Tax Relief In Optimizing Regional Revenue At The Regional Revenue Agency Of North Sulawesi Province. *Jurnal Accountability*, 11(2), 50–58.

- Rustam, A., Adiningrat, A. A., Said, S., Nur, M., & Afni, N. (2023). Tax Amnesty Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(1), 700–707.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta Jurnal Ilmiah*, 2, 44–54.
- Sadhana, K. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Sarwano, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Sefriyadi, I., Andani, I. G. A., Raditya, A., Belgiawan, P. F., & Windasari, N. A. (2023). Private car ownership in Indonesia: Affecting factors and policy strategies. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 19. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2023.100796>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). WILEY.
- Setyawan, D., NC, A. P., & Firdausi, F. (2021). Model George Edward III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)*, 3(2), 9–19.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV ALFABETA.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawati*, 4(1), 25–36.
- Ulhaq, D., Mahsyar, A., & Riskasari. (2022). Implementasi Pelayanan Publik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Drive Thru di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4), 1193–1207.
- Yunus, M., Fitriani, Serano, V. R., Albertus, Maturan, Y., & Hamzah, H. (2019). Public Policy Formulation Model Based on Local Interest in Border Areas. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(04), 11–22.